

## **PERSENGKETAAN LAUT MEDITERANIA RIVLITAS TURKI-YUNANI**

**Grevildo Austhin Yoel**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Indonesia,  
Jakarta E-mail : [grevyoel@gmail.com](mailto:grevyoel@gmail.com)

### ***Abstract***

*In this article, the author seeks to examine the Mediterranean Sea dispute, which has been disputed by Turkey and Greece since tensions between the two sides escalated in August 2020, when Turkey sent a ship to explore the eastern Mediterranean waters claimed by Greece. To examine this issue, the author uses the theory of neorealism proposed by Kenneth Waltz regarding the structure of the international system. Then the author uses a qualitative method, namely, the author tries to describe the discussion descriptively by collecting and analysing various literature related to the dispute that occurred. And for the conclusion, the author tries to answer the existing research questions, namely how the Mediterranean dispute can occur and whether there are successful negotiation efforts to reduce the escalation of this conflict. The author hopes that this paper can contribute especially in security and negotiation issues to create a more conducive world through analysing anarchic international structures so that states will act both to pursue and protect their interests in the context of sovereignty where states maintain their existence.*

***Keywords: Neorealism; Mediterranean; Turkey-Greece***

### **ABSTRAK**

Pada artikel ini, penulis berusaha mengkaji persengketaan laut Mediterania yang disengketakan oleh Turki dan Yunani sejak ketegangan kedua belah pihak meningkat pada Agustus tahun 2020, di mana pihak Turki mengutus kapal untuk melakukan eksplorasi di Timur perairan Mediterania yang diklaim oleh Yunani. Untuk mengkaji isu ini penulis menggunakan teori neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz mengenai struktur sistem internasional. Kemudian penulis menggunakan metode kualitatif yakni, penulis berusaha menjabarkan pada pembahasan secara deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan persengketaan yang terjadi. Dan untuk bagian kesimpulan penulis berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang ada yakni bagaimana persengketaan Mediterania dapat terjadi dan apakah ada upaya negosiasi berhasil untuk meredam eskalasi konflik ini?. Penulis berharap agar paper ini dapat memberikan kontribusi terutama dalam persoalan keamanan dan negosiasi untuk menciptakan dunia yang lebih kondusif melalui analisis struktur internasional yang bersifat anarkis sehingga negara akan bertindak baik mengejar maupun melindungi kepentingannya dalam konteks kedaulatan di mana negara mempertahankan keberadaannya.

**Kata Kunci: Neorealisme; Mediterania; Turki-Yunani**

## **I. PENDAHULUAN**

Ketika adanya Perjanjian Westphalia 1648 yang berusaha memisahkan urusan – urusan mengenai politik bernegara dan agama serta mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan, pada akhirnya menjadi tahap awal bagi negara modern lahir dan menjadi selayaknya negara yang kita kenal sekarang ini. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa sekalipun dengan pemisahan antara urusan mengenai agama dan negara yang telah dipisah, bukan berarti bahwa sengketa dan konflik akan hilang begitu saja, namun dengan pemisahan tersebut justru hanya memperjelas moral dalam kaca mata bernegara atas keberadaan dari negara itu sendiri, yang pada akhirnya dapat kita lihat bahwa setiap sudut baik dalam level internasional maupun regional, bahwa ada berbagai konflik yang terjadi baik itu aktor negara dengan sesamanya atau aktor negara melawan aktor non-negara, hal ini menjadi bukti bahwa dengan pemisahan agama dan negara pada akhirnya hanya memperbaiki kaca mata dalam bernegara sehingga negara sadar, dengan moral negara untuk mempertahankan keberadaannya negara akan bertindak baik mengejar dan melindungi kekuasaan dalam tolak ukur kedaulatan.

Dengan kesadaran para pendahulu kita untuk memisahkan urusan negara dengan agama, secara tidak langsung melahirkan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada saat yang sama dengan Westphalia, sehingga menciptakan skema bahwa tindakan – tindakan negara adalah hal yang absolut. Sehingga sejak kelahiran kedaulatan negara maka negara berhak untuk melakukan berbagai tindakan dan hal tersebut benar dalam keabsolutan negara, akan tetapi dengan keabsolutan dalam

tindakan, pada akhirnya menciptakan benturan. Benturan ini dikarenakan bahwa negara sudah menyadari bahwa moral negara adalah berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dengan berbagai “Mengejar atau melindungi kekuasaan”, disatu sisi juga hal ini karena penjamin sebenarnya terhadap keberadaan entitas berdaulat yakni negara berada pada tangan masing – masing negara agar tidak terhapuskan dari tatanan dunia.

Mengenai benturan kepentingan, hal tersebut adalah hal yang normal jika berbicara mengenai hubungan internasional terutama dalam konteks negara yang sebagai entitas berdaulat mempunyai kepentingan. Kepentingan dalam pemahaman pemikiran realisme merujuk pada bentuk kekuasaan yang diincar oleh negara, karena selayaknya manusia negara juga haus akan kekuasaan dan disatu sisi kepentingan tersebut bervariasi tergantung budaya, dan waktu yang ada. Akan tetapi dalam pandangan neorealisme semua tindakan yang dilakukan oleh negara, merupakan tindakan untuk bertahan hidup atau Survival dalam konteks kedaulatan, lebih jelasnya kita dapat lihat pada sengketa laut antara Turki-Yunani.

Hubungan kedua negara ini dalam konteks sejarah sudah sangat buruk mengingat bagaimana kedua pihak melakukan genosida, perseteruan terjadi ketika Turki membentuk perjanjian maritim bersama Libya pada tahun 2019, hal ini kemudian di-Counter oleh Yunani dengan skema yang hampir sama yakni perjanjian maritim bersama Mesir pada tahun 2020. Hubungan kedua pihak sempat memanas ketika kebijakan Presiden Erdogan sebelumnya mencabut status dari Hagia Sophia diketahui sebagai museum, dikonversikan menjadi masjid 2 bulan

sebelum perjanjian maritim antara Yunani dan Mesir dibentuk, kejadian tersebut menyebabkan Yunani kesal, kekesalan Yunani pun dilanjutkan juga ketika perselisihannya bersama Turki dalam klaim wilayah laut yang berada pada Timur Mediterania, di mana klaim kedua pihak disebabkan karena pasokan SDA berupa gas dan minyak yang berada dilepas pantai. Penemuan pasokan SDA ini tentunya dapat membantu perekonomian kedua negara terkhususnya Turki dengan berusaha untuk mengurangi ketergantungan impor gas, yang sebagian besar dari Rusia mengingat sekarang invansi di Ukraina membawa suasana yang cukup tegang, membuat Turki untuk berupaya mendapatkan pasokan gas yang besar bukan hanya untuk dirinya namun hal ini juga didukung dengan upaya Turki yang selama ini berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa yang sedang kesulitan menerima pasokan gas ketika dimulainya konflik Ukraina-Rusia, kenyataan upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa menguat ketika sebelumnya diketahui bahwa Turki telah menemukan pasokan gas yang sangat besar pada kawasan Laut Hitam pada bulan Agustus dan dalam bulan yang sama Turki mengirim kapal Oruc Reis ke daerah perairan yang dipersengketakan. Sedangkan bagi Yunani masih dalam konteks yang sama selain membantu perekonomian Yunani dengan nilai jual dari gas pada pasar internasional yang tergolong sangat tinggi menjadi hal yang patut didapat oleh Yunani dan sebagai anggota dari Uni Eropa, sudah semestinya dengan penemuan SDA ini bisa menolong anggota Uni Eropa lainnya yang masih bergantung pada impor gas Rusia.

Dengan didasari uraian latar belakang, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yakni “Bagaimana persengketaan Mediterania dapat terjadi dan apakah ada upaya negosiasi berhasil

*Vol. 6. No. 1 (2023)*

untuk meredam eskalasi ketegangan?”. Dengan rumusan masalah ini penulis berusaha untuk mengkaji fenomena rivalitas yang terjadi antara Turki-Yunani melihat faktor sejarah yang cukup berpengaruh hingga.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan rivalitas antara Turk-Yunani adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018, p. 213). Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dengan tujuan agar dapat menjabarkan analisis terhadap fenomena rivalitas Turki-Yunani di laut Mediterania dengan tipe penelitian deskriptif dan bentuk penelitian studi kasus. Kemudian peneliti menggunakan sumber data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat mengenai Rivalitas Turki-Yunani di laut Mediterania, sumber tersebut meliputi buku, jurnal, publikasi, website, dan artikel lainnya. Peneliti juga melakukan validasi data sehingga dapat dijamin keabsahaan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembading terhadap data itu (Moleong, 2012, p. 330). Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipoteses, kemudian berdasarkan hipoteses tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak (Sugiyono, 2018, p. 335)

### III. KERANGKA TEORITIS

Untuk melandasi pembahasan pada artikel ini penulis menggunakan teori neorealisme yang difokuskan pada pemikiran Kenneth Neal Waltz melalui karyanya yaitu “*Theory of International Politics* (1979)” yang mengkritik pemikiran realisme klasik dalam memandang secara skeptis dunia internasional dengan menitik beratkan bahwa aktor berupa negara selayaknya manusia yang haus akan kekuasaan dan akan mengejar kekuasaan tersebut dalam tolak ukur kepentingan, untuk mengubah pendekatan sistem menjadi sebuah teori, kita harus beralih dari identifikasi samar-samar tentang kekuatan dan dampak sistemik ke spesifikasi yang lebih tepat, untuk mengatakan unit-unit apa saja yang ada di dalam sistem, untuk menunjukkan bobot komparatif dari penyebab sistemik dan subsistemik, dan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dan dampak berubah dari satu sistem ke sistem yang lain (Waltz, 1979, p. 40 to 41). dalam bukunya Waltz “*Theory of International Politics* (1979)” ia menuangkan pemikirannya dengan menganalisis struktur sistem internasional yang bersifat anarkis, sehingga membuat aktor berupa negara berada pada kondisi *Survival*, dan menyebabkan negara akan bertindak secara *Offensive, Defensive* sampai dengan kerjasama untuk mempertahankan kedaulatannya atau dengan kata lain negara berusaha mempertahankan keberadaannya sehingga tidak hilang dari tatanan dunia internasional, Dalam politik internasional, perhatian yang tepat, dan kemungkinan pelengkap, dari teori sistem ada dua: pertama, untuk melacak pembawa yang diharapkan dari sistem internasional yang berbeda, misalnya, dengan menunjukkan

*Vol. 6. No. 1 (2023)*

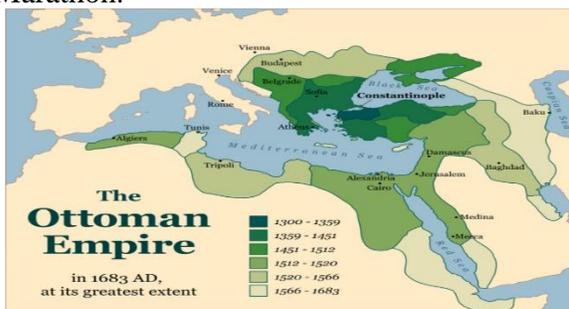
kemungkinan daya tahan dan perdamaian mereka; kedua, untuk menunjukkan bagaimana struktur sistem mempengaruhi unit-unit yang saling berinteraksi dan bagaimana mereka pada gilirannya mempengaruhi struktur (Waltz, 1979, p. 40).

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Relasi Rivalitas Turki-Yunani

Persengketaan Yunani dan Turki tidak hanya didasarkan pada kedaulatan negara untuk mempertahankan keberadaannya dalam tatanan yang ada namun diwarnai juga dengan hubungan sejarah panjang dan kelam yang patut ditelusuri agar memahami persengketaan antara kedua belah pihak. Hal ini ditengarai ketika Kekaisaran Ottoman dibawah Sultan Osman Bey yang sekarat pada tahun 1323 berusaha untuk meyebarkan kebudayaan Islam ke Eropa, ia mengutus putranya Ibn Batutua bersama Orhan Ghazi untuk menggantikannya melakukan hal tersebut, kedua utusan ini memulai tugasnya dengan merebut berbagai kota yang dihuni oleh umat Kristen meliputi Nicea, Nicomedia yang berada pada kawasan Anatolia (Turki) dan yang terakhir itu Smyrna yang berada dipesisir Anatolia selama periode 1329-1331. Kemudian pada tahun 1354, penaklukan Kekaisaran Ottoman terhadap Eropa dimulai ketika Ibn Batutua memijakan kakinya ke Gallipoli dan memulai “Pembersihan” (Genosida Kristen dan penghancuran Gereja namun ada juga Gereja yang dikonversikan menjadi Masjid) kota tersebut yang di mana, penaklukan yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman berlanjut hingga tahun 1453 dibawah Sultan al-Ghazi Muhammad yang menaklukan Konstatinopel (Penaklukan Kekaisaran Bizantium) dan mengubahnya menjadi Istanbul, penaklukan tersebut tentunya memberikan luka yang mendalam bagi

penduduk Yunani sehingga mereka harus menyeberang ke tanah di mana Yunani modern sekarang berpijak, namun luka yang dialami oleh penduduk Yunani tidak sampai situ saja tetapi berlanjut ketika Kekaisaran Ottoman sekali lagi melebarkan sayapnya, berselang 3 tahun yakni pada tahun 1456 Kekaisaran Ottoman telah berhasil menguasai hampir keseluruhan Yunani meliputi Athena dan Marathon.



Gambar 1 (Ekspansi Wilayah Kekaisaran Ottoman)

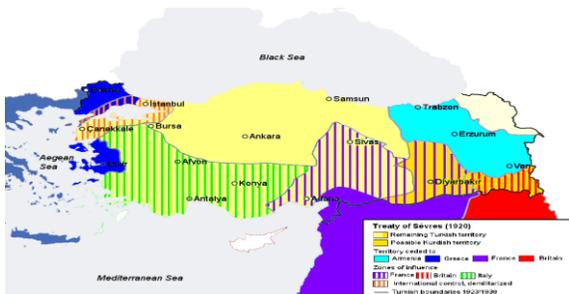
Sumber : History.com

Ekspansi yang dilakukan Kekaisaran Ottoman sudah berusaha dicegah dengan perlawanan oleh penduduk Yunani yang dilakukan oleh kelompok – kelompok nasionalis Yunani yang terbagi menjadi dua gerakan yakni *Philike Hetairia* dan *Klepth*. *Philike Hetairia / Filiki Eteryia* didirikan pada tahun 1814 yang merupakan perkumpulan rahasia yang disebut juga sebagai Asosiasi Persahabatan, pada asosiasi ini sebagian besar diisi oleh para akademis dan intelektual Eropa bertujuan untuk memulai sebuah gerakan kemerdekaan Yunani, sedangkan *Klepth* diisi oleh penduduk Yunani yang melarikann diri ke daerah pegunungan, kelompok ini bertujuan untuk melawan pasukan Turki dengan menggunakan taktik gerilya didaerah pegunungan yang menguntungkan mereka. Usaha Yunani untuk merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman dilancarkan pada tahun 1821 yang

ditandai dengan persatuan seluruh penduduk Yunani untuk mengusir Ottoman dari wilayah mereka, usaha penduduk Yunani terbayarkan tepatnya pada tanggal 13 Januari 1822, di mana setelah perjuangan penduduk Yunani, mereka segera merencanakan deklarasi di Epidaurus, usaha para Yunani terus dilakukan sampai pada pertengahan tahun di tahun yang sama, mereka berhasil mengambil Athena dari Kekaisaran Ottoman dan segera untuk memperkuat diri dengan membentuk pemerintahan sementara di Yunani, tapi tidak berlangsung lama Ottoman dengan bantuan Mesir berhasil mengambil kota – kota sebelumnya pada tahun 1826 dan 1827. Namun usaha Ottoman untuk menguasai Yunani kembali terhenti ketika perjuangan di Eropa bangkit akibat Revolusi Prancis yang pada akhirnya membawa Inggris, Prancis, dan Russia kedalam perseteruan yang ada sejak Mesir menolak untuk menarik pasukan mereka dan direspon oleh tiga entitas ini dengan mengirim armada mereka dengan melalui laut Mediterania, hal ini berujung hingga pertempuran Navarino 20 Oktober 1827. Pada akhirnya dengan bantuan dari ketiga entitas sebelumnya Yunani meraih kemerdekaannya yang ditandai dengan kesepakatan penandatanganan Perjanjian Adrianople pada tahun 1829 sebagai pengakuan terhadap pemerintah Yunani serta perjanjian London 1832 yang bertujuan menjamin kemerdekaan penduduk Yunani.

Sejak Yunani mendapatkan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman, hal ini menjadi bab awal cerita keruntuhan Kekaisaran Ottoman. Dengan peristiwa pecahnya *World War I* dengan serangan Jerman ke Belgia pada waktu itu, Kekaisaran Ottoman yang dibayangi dengan rasa dendam karena kekalahan dimasa lalu disebabkan bantuan sekutu

terhadap kemerdekaan Yunani serta didukung oleh hubungan Ottoman-Jerman yang erat melakukan aliansi dengan Jerman sebagai bentuk keberpihakannya pada blok sentral. Menjalani aliansi dengan Jerman nyatanya bukan hal yang menguntungkan Kekaisaran Ottoman karena pada akhirnya *World War I* dimenangkan oleh Sekutu, dalam kemenangan tersebut, Yunani ikut memberikan kontribusinya karena dijanjikan beberapa wilayah salah satunya yaitu Smyrna sehingga pendaratan pertama pasukan Yunani pada 15 Mei 1919 di Smyrna untuk mendapatkan kota yang dijanjikan. Kekalahan Kekaisaran Ottoman pada akhirnya ditandai dengan perjanjian damai yaitu Perjanjian Serves pada 10 Agustus 1920 yang ditandatangani oleh Sultan Mehmed VI Vahdetin dan mereduksi sebagian besar wilayah yang dimiliki oleh Kekaisaran Ottoman, reduksi tersebut meliputi pemberian wilayah yang telah dijanjikan oleh sekutu kepada Yunani.



Gambar 2 (Perjanjian Serves)  
 Sumber : Wawasansejarah.com

Akan tetapi sejak pendaratan Yunani pada tahun 1919 di Smyrna terdapat kelompok nasionalis yang tidak menerima Yunani untuk memijakan kaki di tanah air mereka sehingga pada 23 April 1920 *Young Turk* yang merupakan gerakan reformasi politik memilih parlemen baru dan berusaha membentuk pasukan untuk melawan militer Yunani dan Sekutu, pasukan tersebut dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang merupakan seorang

*Vol. 6. No. 1 (2023)*

Jenderal sekaligus Presiden Pertama Turki Modern. Setelah dilakukannya berbagai persiapan perang terbuka pun pecah salah satu pertempuran yang sangat terkenal adalah Pertempuran Sakarya yang sangat merugikan Yunani, perang antara Sekutu dan Yunani berlanjut hingga pada Oktober 1922 dengan pasukan reformasi Turki yang memukul mundur para Sekutu dan Yunani. Pertempuran tersebut dikenal dengan “Perang Asia Kecil (1919-1922)” dan berakhir dengan kemenangan pasukan reformasi Turki yang ditandai dengan Perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923 di Swiss yang memperbarui Perjanjian Serves dan menjadi tanda kebangkitannya Turkey Modern dengan Presidennya Mustafa Kemal Atatürk (“Atatürk” Bapak Bangsa Turki).



Gambar 3 (Perjanjian Lausanne)  
 Sumber : Geopol21.com

Hubungan yang buruk antara kedua pihak masih berlanjut ketika terjadi persengketaan pada tahun 1974 mengenai Siprus. Siprus merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman ketika penaklukannya pada Kerajaan Bizantium pada 1570-an akan tetapi Siprus menjadi bagian dari wilayah koloni Inggris sejak tahun 1878 yang didasarkan pada Konvensi Siprus yakni perjanjian rahasia antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Inggris bertujuan agar Kerajaan Inggris dapat menggunakan Siprus sebagai basis militernya untuk melindungi Kekaisaran Ottoman dari

Kekaisaran Rusia, namun ketika *World War I* pecah Inggris kemudian melakukan aneksasi terhadap Siprus, aneksasi yang dilakukan Kerajaan Inggris resmi ketika Perjanjian Lausanne ditandatangani pada 1922 untuk memperbarui Perjanjian Serves dan Turki Modern pada akhirnya menyerahkan hak kepemilikan Siprus kepada Kerajaan Inggris. Namun sekalipun dengan pencaplokan dari Kerajaan Inggris tidak dapat membendung rasa nasionalisme yang tumbuh diantara penduduk Siprus yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi seperti EOKA (*Ethnikí Orgánosis Kipriakoú Agónos/Siprus Yunani*) yang berusaha bersatu dengan Yunani dan mengakhiri pemerintahan Kerajaan Inggris di Siprus; serta juga TMT (*Türk Mukavemet Teşkilatı/Siprus Turki*) yang berusaha menyuarakan pembagian wilayah Siprus Yunani dan Turki, dengan hal tersebut pada akhirnya Kerajaan Inggris memberikan Kemerdekaan kepada Siprus pada 16 Agustus 1960 dengan UUPA (Undang – Undang Pokok Agraria) serta konstitusi yang disepakati pada Perjanjian London dan Zurich 1959, bahwa kursi pemerintahan yang ada setidaknya Wakil Presiden dan 30% dari kursi parlemen harus diduduki oleh Siprus Turki.

Sekalipun memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Siprus tidak terlepas dari perpecahan internal yang disebabkan oleh perseteruan Siprus Yunani dan Turki pada malam Natal 1963 yang memakan banyak korban pada kedua Siprus, perseteruan tersebut membuat PBB untuk menurunkan Pasukan Pemelihara Perdamaian pada 1964. Gelonjak ketegangan kedua pihak melonjak pada tahun 1974 tepatnya pada 15 Juli ketika Siprus Yunani melakukan Kudeta yang didukung oleh Juntan Militer di Yunani untuk menyatukan Siprus Yunani dengan Yunani, dengan kudeta tersebut 5 hari setelah kudeta Siprus Yunani, Turki

merespon kudeta yang terjadi dengan menyerbu wilayah Siprus melalui Utara Siprus dengan alasan demi menjaga keutuhan Siprus dan berusaha untuk merestorasi UUPA 1960 namun alasan tersebut ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional. Sekalipun adanya kesepakatan gencatan senjata tidak lama setelah invansi Turki ke Siprus, kesepakatan tersebut justru memperbesar keretakan yang ada dalam internal Siprus yang pada akhirnya pada 1983 Siprus yang berada di Utara yakni Siprus Turki bersama pasukan Turki yang masih menduduki wilayah tersebut menyatakan kemerdekaannya meskipun hanya diakui oleh Turki dan di mata komunitas internasional hal tersebut dianggap ilegal.



Gambar 4 (Siprus setelah konflik 1974)  
 Sumber : The Washington Post.com

Dengan rangkaian peristiwa yang sangat panjang dan kalam serta kompleksitasnya masing – masing, sejarah inilah yang membentuk hubungan Turki dan Yunani yang sangat buruk sehingga jika kita beralih pada kawasan yang dipersengketakan yakni Mediterania Timur tentunya membuat Turki maupun Yunani berusaha bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya pada kawasan Timur Mediterania di mana asumsi Neorealisme Waltz bahwa sistem internasional yang anarkis membuat setiap aktor dalam kondisi *Survival* membuat Turki dan Yunani melakukan berbagai tindakan hanya untuk mempertahankan

keberadaannya hal ini juga didukung dengan trauma masa lalu.

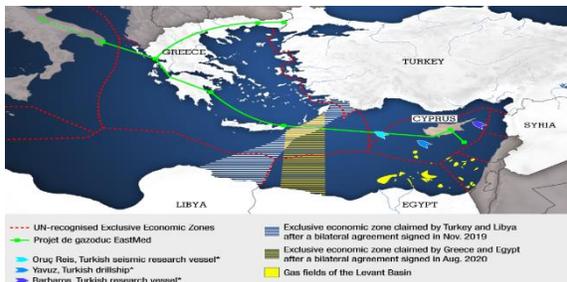
### **Analisis Persengketaan Mediterania Rivalitas Kedaulatan Turki-Yunani**

Ketika *United States Geological Survey* menyatakan terdapat 3,5 triliun m<sup>3</sup> gas dan 1,7 miliar barel minyak bumi yang berada pada kawasan Timur Mediterania, menarik perhatian setiap negara yang mempunyai akses terhadap laut tersebut untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, usaha setiap aktor untuk menekankan kembali batas laut yang dimilikinya memicu ketegangan yang cukup serius pada konflik antara Ankara dan Athena. Ketegangan ini dipicu pada saat Kebijakan Presiden Erdogan untuk menjalin kerjasama maritim dengan Mesir pada 27 November 2019 sehingga memperluas zona perairan yang dimiliki oleh kedua negara ini, hal ini kemudian ditentang sangat keras dari Pemerintah Yunani karena menganggap perjanjian tersebut mengancam kedaulatan Yunani karena Turki berusaha untuk memiliki zona perairan yang berada di pulau Kreta sedangkan Libya mengklaim bahwa Kreta menjadi bagian dari Libya, kerjasama Turki-Libya ini memicu pengusiran Duta Libya di Athena. Ketegangan Turki dan Yunani meningkat sekali lagi ketika kebijakan Presiden Erdogan pada bulan Juli 2020 untuk secara resmi membuka kembali akses ke Hagia Sophia sebagai tempat beribadah (Masjid) dan mencabut statusnya sebagai Museum, kebijakan ini tentunya membuka kembali luka lama yang dialami oleh Yunani dalam sejarahnya, sebulan setelahnya tepatnya 10 Agustus Turki juga mengirimkan kapal riset Oruc Reis beserta 2 kapal perang yang bertujuan mengeksplorasi potensi gas dan minyak pada perairan yang diklaim oleh Yunani (Selatan pulau Kastellorizo, Timur pulau Kreta). Demi menjaga kedaulatannya, Yunani melakukan hal

### Vol. 6. No. 1 (2023)

yang serupa pada perjanjian maritim Turki-Libya, dengan melakukan perjanjian maritim bersama Mesir pada 29 Agustus 2020 dan pada hari yang sama Turki menggelar latihan perang di laut Mediterania hal ini kemudian memicu kegerahan Yunani akan tetapi ketegangan kedua belah pihak sempat mereda pada awal bulan September ketika Turki dan Yunani melakukan pembicaraan di ranah NATO pembicaraan tersebut berujung pada penarikan kapal Oruc Reis pada 15 September. Usaha untuk berdialog dari Pihak Turki dihindari oleh Yunani karena menganggap kebijakan Erdogan sudah cukup melampaui batas dan mengancam kedaulatan Yunani sehingga berusaha menyuarkan hak mereka pada ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*) dan ICJ (*International Court of Justice*) untuk mendapatkan hak mereka mengenai klaim zona perairan, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa pihak Turki berusaha berdialog akan tetapi jika Yunani terus menolak untuk berdialog maka akan ada konsekuensi dilapangan nanti. Setelah redanya situasi karena campur tangan NATO, situasi kembali memanas setelah tindakan provokasi Yunani dengan menggelar latihan perang menjelang hari kemerdekaan Turki pada akhir bulan Oktober memicu naiknya ketegangan pada kedua pihak sekali, kegiatan tersebut memicu Ultimatum Presiden Erdogan untuk mengirimkan kembali kapal Oruc Reis ke daerah yang dipersengketakan dan menyatakan bahwa Turki akan berusaha dengan segala cara demi mengklaim haknya dikawasan tersebut hal ini didasari karena Turki tidak meratifikasi perjanjian laut UNCLOS 1982. Ketegangan kedua negara sekali lagi diredamkan oleh NATO yang berujung pada kesepakatan untuk membatalkan latihan militer.

Dengan rangkaian peristiwa tersebut, klaim yang dilakukan oleh setiap pihak baik itu Yunani dan Turki adalah hal yang absolut, hal ini karena klaim yang dilakukan sudah didasari dengan kedaulatan Turki dan Yunani sebagai entitas yang berdaulat sejak perjanjian Westphalia 1648, akan tetapi perlu ada analisis dan pertimbangan dari pernyataan masing – masing pihak mengenai klaim yang ada karena sekalipun adanya kedaulatan bukan berarti pertimbangan tidak dapat dilakukan.



Gambar 5 (Sengketa Mediterania Turki-Yunani)

Sumber: Harakah.id

Analisis yang pertama dalam konteks sejarah dapat kita lihat pada sisi Yunani, kita mengetahui bahwa sebagai salah tempat lahirnya peradaban tertua, Yunani mempunyai bukti historis yang kuat mengenai pengklaiman yang dilakukan, terutama pada kawasan pulau Kreta. Peradaban Kreta sudah ada sejak 2600-1500 SM pada kejayaan kebudayaan Kreta pada era Raja Minos (periode Minoan), pada waktu itu Raja Minos mampu menyatukan dataran Eropa, Asia, dan Afrika karena mempunyai armada yang sangat kuat sehingga menguasai lautan yang ada. Sedangkan pada pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Turki tidak cukup kuat untuk mematahkan pernyataan Yunani, pernyataan klaim Turki dikaitkan dengan salah satu doktrin yang ada yakni doktrin *Blue Homeland*, doktrin

ini digagas oleh Laksamana Cem Gürdeniz dan dipromosikan pada kesepakatan Turki-Libya 2019 oleh Laksamana Cem Yayıci. Doktrin Tanah Air Biru adalah konsep geopolitik yang tidak tepat, samar-samar, dan tidak resmi, yang berakar pada pertengahan tahun 2000-an (Dalay, 2021, p. 6), sekalipun mempunyai dasar yang kurang kokoh, doktrin ini diberikan tempat oleh pemerintah Turki ketika kegagalan upaya kudeta pada 2016, anti-Westernisme meningkat di Turki dan pemerintah mengambil haluan nasionalis, membuka jalan bagi doktrin Tanah Air Biru untuk menjadi lebih mainstream dan mendapatkan lebih banyak pendukung di antara para elit yang memerintah di Ankara (Dalay, 2021, p. 6).



Gambar 6 (Visualisasi Doktrin *Blue Homeland* oleh Yayici)

Sumber: Mavivatan.Net

Dengan demikian sekalipun doktrin ini tidak memiliki fondasi yang kokoh sebagai kebijakan yang resmi akan tetapi doktrin ini menjadi dasar tindakan dan pernyataan yang dilontarkan oleh pemerintah Turki mengenai kebijakan di Mediterania Timur demi kedaulatannya, hal ini disebabkan karena ada tiga gagasan utama yang berusaha diberikan oleh Laksamana Yayici yakni visualisasi terhadap perluasan batas maritim Turki di Mediterania, seruan para Angkatan Laut Turki untuk menata kembali kekuatan Turki sebagai negara maritim, dan terakhir

agar Turki bisa memposisikan dirinya di mata dunia.

Berikutnya dapat kita lihat pada validasi perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks hukum. Perjanjian pada 2019 antara Turki-Libya menghasilkan zona perairan yang diklaim menjadi cukup luas, klaim tersebut ditentang oleh Yunani karena mengancam kedaulatannya, pada perjanjian antara Turki-Libya dapat dikatakan tidak sah karena pada dasarnya sekalipun negara mempunyai kedaulatan dalam membuat suatu kebijakan bukan berarti tidak memperhatikan hukum internasional seperti norma, dan prinsip yang ada, seperti prinsip kedaulatan di mana perjanjian Turki-Libya yang besinggungan dengan batas laut milik Yunani tepatnya di pulau Kreta sekalipun kedua negara tersebut menyadari akan hal ini keduanya tetap melakukan kesepakatan, secara tidak langsung tindakan ini adalah tindakan provokasi karena tidak ada undangan resmi untuk pemerintah Yunani dalam membicarakan kesepakatan tersebut, hal berikut bahwa perjanjian tersebut tidak didasarkan pada *Good Faith* atau iktikad baik sesuai dengan Konvensi Wina 1969 pasal 26 mengenai perjanjian antar negara harus didasarkan pada iktikad baik, sehingga mengenai perjanjian antara Turki-Libya dapat dikatakan tidak sah karena perjanjian tersebut tidak mempertimbangkan kedaulatan Yunani di Kreta dan Turki-Libya hanya ingin mendapatkan kedaulatan mereka dalam klaim yang ada tanpa pertimbangan tersebut dan tentunya hal ini bukan hal yang sesuai dengan prinsip "Iktikad Baik". Kemudian sebagai entitas berdaulat yang menjadi anggota *United Nation* atau UN tentunya Turki maupun Libya harus menjalankan prinsip yang sudah terpapar dengan jelas pada *United Nation Charter* seperti menghormati prinsip persamaan

Vol. 6. No. 1 (2023)

kedaulatan negara, *Good Faith*, dan memelihara perdamaian dan kerjasama. Pada perjanjian Turki-Libya, Libya memberikan pernyataan yang sangat memprovokasi setelah menyepakati perjanjian yang ada yakni mengklaim pulau Kreta yang tentunya milik Yunani tanpa pembicaraan dimeja negosiasi, hal ini justru memicu ketegangan yang lebih meningkat dan mengancam perdamaian dalam skala regional maupun internasional. Sedangkan pada perjanjian antara Yunani dan Mesir pada 2020, dapat dikatakan sebagai balasan untuk perjanjian yang telah dilakukan Turki bersama Libya sebelumnya, dan dalam segi prinsip kedaulatan, *Good Faith*, dan lainnya, perjanjian tersebut dapat dikatakan sah karena berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya Yunani dengan bantuan Mesir dalam sebuah pakta maritim, perjanjian tersebut juga tidak melanggar zona perairan Turki dan Libya dan dalam segi *Good Faith* perjanjian ini bertujuan untuk menegaskan kepemilikan daerah perairan yang diklaim Yunani dan Mesir tidak bermaksud untuk memprovokasi.

Lalu mengenai UNCLOS 1982 setiap negara yang meratifikasi hukum laut ini memiliki kurang lebih 200 mil kepemilikan atas laut mereka terdiri atas, 12 mil zona teritorial dan 188 mil Zona Ekonomi Eksklusif, lalu pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan garis pangkal normal yang pengukurannya dimulai dari surut terjauh pantai suatu negara atau garis pangkal lurus dengan menghubungkan beberapa titik dari pulau terluar, namun jika klaim yang dilakukan menggunakan landasan kontinen maka klaim laut yang dimiliki suatu negara bisa melebihi 200 mil dan maksimal klaim yang dilakukan bisa mencapai 350 mil karena pengukurannya berdasarkan tanah yang masih terhubung dengan dataran utama (Kontinen/Benua), oleh karena itu negara

yang memiliki perairan yang diklaim sesuai dengan UNCLOS 1982 dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi dipermukaan dan dibawah laut yang diklaimnya sehingga negara yang ingin melintasi dan melakukan kegiatan berupa eksporasi dan ekploitasi harus mendapat izin dari negara yang mengklaim laut tersebut.

keadilan maka tentunya sangat tidak adil bagi Turki, mengingat jika didasarkan pada UNCLOS maka Yunani mendominasi sebagian besar perairan, jika ZEE Yunani diukur dari titik terluar pulaunya maka Kreta, Rhodes dan khususnya Kastellorizo yang berjarak 2 Km dari Turki akan mempunyai ZEEnya sendiri, hal ini merupakan mimpi buruk bagi pemerintah Turki.



Gambar 7 (ZEE dan Landas Kontinen)  
 Sumber: Rishiupsc.com

Gambar 8 (Pulau Kastellorizo)  
 Sumber: Agora Dialogue.com

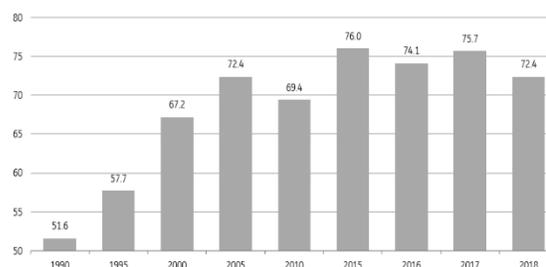
Baik itu Yunani maupun Turki yang mempunyai kedaulatan untuk mengklaim zona perairan yang ada di Timur Mediterania, akan tetapi dikarenakan Turki yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982 dan Libya yang menandatangani akan tetapi tidak meratifikasi menjadikan perjanjian pada kedua pihak dalam mengklaim perairan yang ada bertentangan dengan UNCLOS 1982, sedangkan Yunani maupun Mesir merupakan negara yang meratifikasi hal tersebut membuat fondasi dalam perjanjian mereka lebih kokoh sekalipun terbentuk setahun setelah perjanjian Turki-Libya. Yunani sendiri karena meratifikasi pada dasarnya berhak mempertahankan kedaulatan mereka sedangkan Turki karena tidak meratifikasi menjadi halangan yang besar untuk proses klaim yang dilakukan sekalipun mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Dalam konteks hukum dan sejarah Yunani mempunyai bukti yang kuat untuk mempertahankan kedaultannya akan tetapi jika kita membahas pada konteks

### Upaya Negosiasi Sengketa Laut Mediterania Turki-Yunani

Negosiasi antara Yunani dan Turki mengenai sengketa bilateral sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga 2016, namun persoalan yang dinegosiasikan tidak hanya mengenai eksplorasi gas dilaut Mediterania saja namun juga mengenai persoalan di Laut Aegea mengenai ruang udara. Total negosiasi yang telah dilakukan sudah mencapai 60 putaran, pada tahun 2016 pemerintah Yunani menanggukkan negosiasi yang dilakukan karena kebuntutan demi kebuntutan selalu ditemui dalam setiap perundingan seperti tawaran yang diberikan satu pihak berusaha mengambil keuntungan lebih terhadap penyelesaian sengketa dan *Package Deal* yang tidak dapat menyatukan kepentingan bersama. Akan tetapi pada akhirnya kedua belah pihak setelah jeda selama 5 tahun berusaha kembali untuk mencari sebuah solusi dan melakukan perundingan kembali, putaran ke-61 dilakukan di

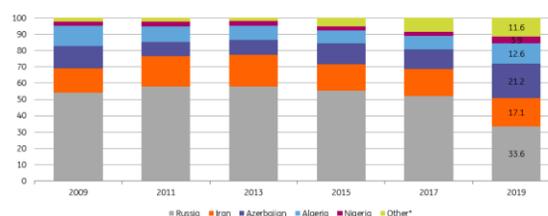
Istanbul pada 25 Januari 2021, putaran ke-62 pada 16 Maret di Athena, dan putaran ke-63 dilakukan di Ankara pada 6 Oktober. Sekalipun tidak ada informasi resmi mengenai hasil perundingan pada 3 pertemuan tersebut, secara mengejutkan pada 13 Maret 2022 Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis bertemu di Istanbul dan menyatakan bahwa mereka akan memperbaiki hubungan yang tegang dan meningkatkan kerjasama terutama dalam hal ekonomi dibawah memanasnya isu invansi Rusia ke Ukraina, dengan ini dapat dikatakan bahwa pada 3 pertemuan sebelumnya sebuah kesepakatan telah didapat dan *Package Deal* telah dirumuskan. *Package Deal* yang telah dirumuskan berkaitan dengan invansi Rusia ke Ukraina, hal ini diperkuat karena pada pola politik Presiden Erdogan yakni munculnya Turki Baru, penguasaan terhadap militer, merubah paradigma sekular terhadap masyarakat Turki, menuju Uni Eropa, mempertahankan kembali ideologi Islam sebagai ideologi mayoritas masyarakat Turki, mengembangkan perekonomian Turki (Bahri, 2017, p. 344). Pada point “Menuju Uni Eropa” dan “Mengembangkan Perekonomian Turki” menjadi salah satu unsur kuat dalam *Package Deal* antara Ankara-Athena di mana hal ini karena dengan pasokan gas yang telah ditemukan Turki di Laut Hitam, hal ini akan mempermudah Turki untuk memperkecil ketergantungan impor gas Turki terhadap Rusia yang disatu sisi juga hal yang sama dirasakan oleh sebagian besar negara Uni Eropa termasuk Yunani sejak invansi Rusia kemudian demi mengembangkan ekonomi negara Turki, Turki memerlukan target ekspor dari gas mereka di mana Uni Eropa menjadi target yang sangat jelas mengingat tujuan politik Presiden Erdogan. Jadi dalam *Package Deal* antara Yunani dan Turki dalam

sengketa Mediterania, tawaran yang diberikan oleh Turki bisa berupa harga murah dalam impor gas Yunani dari Turki atau kerjasama untuk meningkatkan sektor energi kedua negara agar Yunani dapat membantu krisis energi di Eropa, asumsi ini diperkuat ketika fokus pertemuan pimpinan kedua belah pihak menyatakan pada sektor perekonomian, kemudian harga sebesar apa yang harus dibayar oleh Yunani dalam *Package Deal* tersebut?, harga yang harus dibayar oleh Yunani adalah delimitasi atau pembatasan pada klaim ZEE Yunani.



Gambar 9 (Ketergantungan Turki Terhadap Impor Gas)

Sumber: ING Think.com



Gambar 10 (Impor gas Turki dari Berbagai Negara)

Sumber: ING Think.com

Harga yang harus dibayar oleh Yunani adalah mengorbankan sedikit ZEE milik mereka, karena selama ini Yunani berusaha untuk menyuarakan klaim mereka di ITLOS maupun ICJ agar menegaskan kepemilikan ZEE mereka di wilayah Mediterania yang dipersengketakan, akan tetapi dengan kesepakatan yang telah disepakati Yunani harus merubah apa yang

mereka suarakan terhadap ITLOS dan ICJ yakni pembagian yang adil. Mengenai pembagian yang adil, UNCLOS sudah memperkenalkan sebuah solusi terhadap persengketaan di Mediterania yakni "Equidistance" yang memdelimitasi ZEE dengan membaginya dengan adil, UNCLOS memperkenalkan prinsip "solusi yang adil" sebagai pengganti "aturan jarak yang sama" untuk menjadi dasar melakukan arbitrase delimitasi maritim, yang memperkuat posisi Turki. Perjanjian ini memberikan pertimbangan proporsionalitas panjang garis pantai yang berdekatan dalam menyesuaikan garis batas maritim yang sama untuk delimitasi maritim (Yildiz, 2020, p. 132) di mana dengan pembagian yang adil dengan membatasi ZEE milik Yunani (khususnya pulau Kreta, Rhodes, dan Kastellorizo) sehingga Turki juga mendapatkan porsi yang proposional akan menjadi solusi yang sangat efektif karena sekalipun Turki berusaha mengklaim daerah yang disengketakan dan sering dikaitkan dengan doktrin *Blue Homeland* pembagian yang adil dan merata tentunya tidak akan ditolak oleh pemerintah Ankara agar menjaga kedaulatan mereka, penerapan solusi ini pernah dilakukan pada kasus Libya-Malta pada tahun 1875 di mana ICJ mencoba melakukan penyesuaian terhadap batas yang dimiliki, lalu ICJ menyesuaikan garis pangkal sebesar 18 mil ke arah utara terhadap Malta sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas yang adil untuk mencerminkan panjang bagian-bagian yang relevan dari garis pangkal masing-masing negara (Yildiz, 2020, p. 133) Akan tetapi untuk menerapkan solusi ini di sengketa Yunani-Turki harus dimulai dari ajuan yang disampaikan dari pihak Yunani ke ICJ maupun ITLOS karena Turki sebagai negara yang tidak meratifikasi tidak mempunyai kedaulatan untuk mengajukan banding.

## V. KESIMPULAN

Ketegangan antara Turki-Yunani dikarenakan klaim wilayah perairan di Timur Mediterania membawa kedua belah pihak untuk berseteru satu akan yang lain, di mana ketegangan tersebut ditopang sangat baik oleh trauma masa lalu yang dirasakan sehingga kedua negara tentunya berusaha mempertahankan kedaulatannya demi keberlangsungan hidup negaranya, akan tetapi berlarut dalam sebuah konflik tidak akan bersifat konstruktif terhadap Turki maupun Yunani, sehingga dilakukannya sebuah negosiasi yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2002 namun kebuntutan dalam negosiasi sering ditemui akibat dari tiap pihak yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya namun setelah melakukan pembicaraan pada putaran ke-61 sampai ke-63 yang dilakukan sepanjang tahun 2021, pada tahun 2022 kedua belah pihak kembali dengan menyatakan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam hal ekonomi dan memperbaiki hubungan yang buruk dari kedua negara, sehingga asumsi bahwa pertemuan yang dilakukan pada sepanjang 2021 telah dirumuskan sebuah *Package Deal* yakni limitasi ZEE Yunani dan kerjasama dalam hal gas dengan pihak Turki mengingat sejak invansi Rusia Uni Eropa termasuk Yunani menjadi kesulitan untuk memenuhi ketergantungan gas mereka. Dengan ini asumsi dari Neorealisme Waltz mengenai struktur internasional yang bersifat anarki mengakibatkan negara berada pada kondisi *Survival* membuat negara akan melakukan apapun demi menjaga kedaulatannya baik bertindak secara *Offensive*, *Defensive* ataupun juga bekerja sama, pada sengketa ini kedua negara berseteru karena penjamin sebenarnya dari kedaulatan negaranya adalah negaranya sendiri, kesadaran tersebut diperkuat dengan trauma masa lalu

yang telah dialami, namun kedua negara juga menyadari bahwa berkonflik tidak akan menjadi suatu yang konstruktif, akibatnya untuk menjaga keberadaan keberlangsungan hidup negaranya, kedua negara perlu mengkesampingkan trauma mereka masing – masing dan memulai membangun hubungan yang baik dan sebuah kerjasama demi mempertahankan kedaulatan mereka dalam konteks keberlangsungan negaranya atau *Survival*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020, Oktober 9). *Jelang Hari Republik Turkey, Yunani Gelar Latihan Militer*. Diambil dari Republika: <https://republika.co.id/berita/internasional/eropa/qhxwk1561619392/jelang-hari-republik-turki-yunani-gelar-latihan-militer>
- Aini, N. (2020, September 16). *Penyebab Ketegangan Turki-Yunani Di Mediterania Timur*. Diambil dari Republika: <https://republika.co.id/berita/internasional/asia/qgqu4i2104949863/>
- Asrianti, S. (2020, Oktober 25). *NATO: Yunani Dan Turki Sepakat Batalan Latihan Perang*. Diambil dari Republika: <https://republika.co.id/berita/dunia-Islam/dunia/qipk92430/nato-yunani-dan-turki-sepakat-batalan-latihan-perang>
- Azzam, M. A. (2020, Agustus 8). *Penemuan gas di Laut Hitam jadi tanda Turki masuk era baru*. Diambil dari Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/turki/penemuan-gas-di-laut-hitam-jadi-tanda-turki-masuk-era-baru/1949682>
- Bahri, S. (2017). *Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan (Studi Terhadap Pergulatan Pulitik Sekular Versus Islam Dalam Revolusi Turki)*. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 4(2), 329-380.
- BBC. (2020, September 12). *Greece-Turkey tensions: Greece announces military boost*. Diambil dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-54132044>
- BBC. (2020, Oktober 1). *Turkey and Greece set up military hotline amid energu tension*. Diambil dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-54378022>
- BBC. (2020, Agustus 24). *Turkey-Greece rival military exercises due as oil tension rise*. Diambil dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-53892896>
- BBC. (2020, Agustus 25). *Turkey-Greece tensions escalate over Turkish Med drilling plans*. Diambil dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-53497741>
- Bearak, M. (2017, Januari 13). *There are high hopes for Cyprus reunification talks — even as they hit another impasse*. Diambil dari The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/01/13/why-hopes-are-so-high-about-the-talks-to-reunify-cyprus/>
- Budiwinarto, A. (2020, Oktober 12). *Turki Kirim 3 Kapal Eksplorasi ke Mediterania, Kembali Picu Ketegangan dengan Yunani*. Diambil dari iNews.id: <https://www.inews.id/news/internasional/turki-kirim-3-kapal-eksplorasi-ke-mediterrania-kembali-picu-ketegangan-dengan-yunani>
- Chakra, H. (2021, September 17). *The Cyprus Crisis*. Diambil dari About History: <https://about-history.com/the-cyprus-crisis/>
- Christiyaningsih. (2019, Desember 13). *Turki Kirim Perjanjian Maritim*

- Libya ke PBB.* Diambil dari Republika:  
<https://d.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/12/13/q2fgjb459-turki-kirim-perjanjian-maritim-libya-ke-pbb>
- Cyprus Inform. (2015, September 1). *1974: the history of military conflict – Part I.* Diambil dari Cyprus Inform: [https://www.kiprinform.com/en/stories\\_of\\_cyprus/1974-the-history-of-a-military-conflict-part-i/](https://www.kiprinform.com/en/stories_of_cyprus/1974-the-history-of-a-military-conflict-part-i/)
- Cyprus Inform. (2015, September 21). *1974: the history of military conflict – Part II.* Diambil dari Cyprus Inform: [https://www.kiprinform.com/en/stories\\_of\\_cyprus/1974-the-history-of-military-conflict-part-ii/](https://www.kiprinform.com/en/stories_of_cyprus/1974-the-history-of-military-conflict-part-ii/)
- Dalay, G. (2021). Turkey, Europa, And The Eastern Mediteranean: Charting A War Out Of The Current Deadlock. *Brookings Doha Center*, 1-15.
- Deutsche Welle. (2020, Agustus 27). *Turki dan Yunani Bersitegang di Timur Laut Tengah.* Diambil dari DW News: <https://www.dw.com/id/turki-dan-yunani-bersitegang-di-timur-laut-tengah/a-54716210>
- Deutsche Welle. (2020, September 7). *Turki Desak Uni Eropa Bersikap Netral dalam Konflik Timur Laut Tengah dengan Yunani.* Diambil dari DW News: <https://www.dw.com/id/turki-desak-uni-eropa-bersikap-netral-dalam-konflik-timur-laut-tengah-dengan-yunani/a-54836433>
- Deutsche Welle. (2020, Oktober 12). *Turki Kirim Balik Kapal Ekplorasi ke TImur Laut Tengah.* Diambil dari DW News: <https://www.dw.com/id/turki-kirim-balik-kapal-eksplorasi-ke-timur-laut-tengah/a-55238701>
- Deutsche Welle. (2022, Maret 14). *Turki dan Yunani Bahas Perang Ukraina dan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama.* Diambil dari DW News: <https://www.dw.com/id/bahas-perang-ukraina-turki-dan-yunani-perbaiki-hubungan/a-61114759>
- Dhani, A. (2021, Agustus 30). *Hari Kemenangan Turki Melawan Invansi Yunani.* Diambil dari Tirto.Id: <https://tirto.id/hari-kemenangan-turki-melawan-invasi-yunani-cvzT>
- Dikarma, K. (2020, Agustus 28). *Mesir Capai Kesepakatan Mairitim dengan Yunani, Balas Turki?* Diambil dari Republika: <https://republika.co.id/berita/qfruch377/mesir-capai-kesepakatan-maritim-dengan-yunani-balas-turki>
- Djuyandi, Y., Rizkiawan, S., & Perdana, A. J. (2021). Kebangkitan Turkey Sebagai Kekuatan Menengah Kawasan Dan Pandangannya Terhadap Negara - Negara Uni Eropa Dan Negara Di Sekitarnya. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 19-36. doi:<https://doi.org/10.23960/jasp.v5i1.72>
- Dsy. (2020, September 7). *Sejarah Panjang Perseteruan Turki-Yunani.* Diambil dari Jernih.co: <https://jernih.co/depth/sejarah-panjang-perseteruan-turki-yunani/>
- Dulgarian, J. (2020, Juli 15). *Kastellorizo Is The Key To Turkish & Greek Ambitions In The Eastern Mediterranean.* Diambil dari Agora Dialogue: <https://forum.agora-dialogue.com/2020/07/15/kastellorizo-is-the-key-to-turkish-greek-ambitions-in-the-eastern-mediterranean/>
- Fathoni, R. S. (2018, Agustus 26). *Perjanjian Sevres 1920 M.* Diambil dari Wawasan Sejarah:

- <https://wawasansejarah.com/perjanjian-sevres/>
- Fosma Media. (2019, Maret 4). *Keruntuntuhan Khilafah Dalam Konteks Sejarah*. Diambil dari Fosma Id: <https://www.fosma.id/2019/03/keruntuhan-khilafah-dalam-konteks.html>
- Grigoriadis, I. N. (2014). Energy Discoveries In The Eastern Mediterranean: Conflict Or Cooperation. *Middle East Policy*, 21(3), 124-133. doi: <https://doi.org/10.1111/mepo.12087>
- Gunawan, Y., Sastra, V. J., Tsanyprakosa, L. Y., & Ovitasaki, M. (2020). The Validity Of Turkey-Libya's Agreement On Maritime Boundaries In International Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 170-185. doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.170-185>.
- Hospita, M. E. (2021, Maret 17). *Turki, Yunani gelar negosiasi putaran ke-62 di Athena*. Diambil dari Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-yunani-gelar-negosiasi-putaran-ke-62-di-athena/2178694>
- Kabakçı, F. (2021, Oktober 7). *Turki dan Yunani gelar perundingan konsultatif putaran ke-63 di Ankara*. Diambil dari Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-dan-yunani-gelar-perundingan-konsultatif-putaran-ke-63-di-ankara/2385005>
- Kruger, P. J. (2021, Juli 21). *6 Reasons Why the Ottoman Empire Fell*. Diambil dari History: <https://www.history.com/news/ottoman-empire-fall>
- Merkezi, İ. (2020, Agustus 17). *Mavi Vatan Kavramı ve Önemi*. Diambil dari MAVIVATAN.NET: <https://mavivatan.net/mavi-vatan-kavrami-ve-onemi/>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammet Mercan. (2020, Agustus 24). *Turkey's gas discovery could reduce energy dependency*. Diambil dari ING: <https://think.ing.com/articles/black-sea-energy-more-to-prove>
- Nursya'bani, F. (2017, Juli 20). *Sejarah Hari Ini: Turki Invansi Siprus*. Diambil dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/otdmhq366/sejarah-hari-ini-turki-invasi-siprus>
- Permana, R. H. (2020, 25 Agustus). *Memanas, Turki dan Yunani Sama-sama Gelar Latihan Militer*. Diambil dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5145592/memanas-turki-dan-yunani-sama-sama-gelar-latihan-militer>
- Potongan Nostalgia. (2018, Agustus 14). *Yunani Melepaskan Diri setelah 376 Tahun Dikuasai Turki Ottoman*. Diambil dari Potongan Nostalgia: <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/perang-kemerdekaan-yunani-buah-semangat-romantisme-bangsa-eropa-1534246303616159665/full>
- Psaropoulos, J. (2021, Januari 25). *Greece, Turkey launch Mediterranean crisis talks after 5 years*. Diambil dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2021/1/25/greece-and-turkey-resume-maritime-talks>
- RISHI IAS ACADEMY. (2018, September 3). *United Nations Conventions On The Law Of The Sea -All About - Explained!* Diambil dari Rishiupsc.com:

- <https://rishiupsc.com/united-nations-conventions-on-the-law-of-the-sea-all-about-explained/>
- Sanchez, C. O. (2022, November 16). *TURQUÍA, GRECIA Y EL DEBATE DEL DODECANESO*. Diambil dari Geopol: <https://geopol21.com/turquia-grecia-y-el-debate-del-dodecaneso/>
- Sanjaya, V. (2020, Desember 28). *Pertempuran Sakarya, 23 Agustus-13 September 1921: Saat Kemal Atatürk Menyelamatkan Keutuhan Turki Dari Invansi Yunani*. Diambil dari Sejarah Militer: <https://sejarahmiliter.com/pertempuran-sakarya-23-agustus-13-september-1921-saat-kemal-attaturk-menyelamatkan-keutuhan-turki-dari-invasi-yunani/sejarahmiliter/28/12/2020/12/07/>
- Sondarika, W. (2015). Peradaban Yunani Kuno. *Jurnal Artefak*, 3(2), 195-206. doi:<https://doi.org/10.25157/ja.v3i2.338>
- Soraya, D. A. (2020, Juni 16). *Trauma Eropa Invansi Berdarah Ottoman Dan Syahidnya Murad I*. Diambil dari Republika: <https://republika.co.id/berita/qc0czk320/trauma-eropa-invansi-berdarah-ottoman-dan-syahidnya-murad-i>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, A. (2020, Agustus 30). *Turki Gelar Latihan Perdang di Laut Mediterania, Yunani Makin Gerah*. Diambil dari Inews.id: <https://www.inews.id/news/internasional/turki-gelar-latihan-perang-di-laut-mediterania-yunani-makin-gerah>
- Vol. 6. No. 1 (2023)*
- Taufiq, F. (2020, September 15). *Ultimatum Erdogan Soal Sengketa Mediterania, Problem Eksplorasi Gas Bumi dan Persetujuan Panas Turki-Yunani*. Diambil dari Harakah.id: <https://harakah.id/ultimatum-erdogan-soal-sengketa-mediterania-problem-eksplorasi-gas-bumi-dan-persetujuan-panas-turki-yunani/>
- United States Geological Survey. (2010, Maret 12). *Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean*. Diambil dari USGS.Gov: <https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/#:~:text=USGS%20Fact%20Sheet%202010-3014%3A%20Assessment%20of%20Undiscovered%20Oil,Basin%20Province%20using%20a%20geology%20based%20assessment%20methodology.>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory Of International Politics*. Boston: Mcgraw-Hill.
- Yildiz, E. (202). The Conflict Between Greece And Turkey In The Mediteranean Sea (International Maritime Law Study). *Jurnal HUKUM UNISSULA*, 36(2), 126-138. doi:<https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11393>.
- Yılmaz, M. E. (2008). SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRK-YUNAN. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(2), 27-44.